

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

*Corporate Governance* saat ini menjadi isu yang sangat global dikalangan perusahaan. Awal munculnya konsep *Corporate Governance* pertama kali ketika dua pakar hukum yaitu Advid Augurus Berner dan Gardiner C. Means menerbitkan monograf berjudul “*The Modern Corporation and Arrate property*” kemudian disusul oleh Eangene Fan dan Michael dalam tulisan “*seperation of ownership and control*” dengan *principal agency janse Theory*-nya. *Isu corporate governance* makin santer terdengar ketika beberapa peristiwa ekonomi terjadi diantaranya, krisis keuangan Asia pada tahun 1997 sebagai awalnya, dilanjutkan dengan perusahaan besar seperti Lehman dan Brother, serta adanya isu terbaru yaitu krisis Sub Prime Mortagage di Amerika Serikat pada tahun 2008.

Salah satu proksi yang dapat digunakan untuk mengukur penerapan *Good corporate governace* di Indonesia adalah dengan *Corporate Perception Index* (CCPI) adalah hasil penelitian dari sebuah lembaga antara The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dengan majalah SWAN yang secara sukarela melakukan pemeringkatan penerapan GCG dari beberapa perusahaan go publick di Indonesia. Program CGPI secara konsisten telah diselenggarakan setiap tahunnya sejak tahun 2001.

Penerapan praktik *Good Corporate Governance* menjadi kepedulian perusahaan sebagai upaya komitmen perusahaan atas penerpan tata kelola perusahaan yang lebih baik, selain itu penerapan good corporate governance merupan sebagai bagian dari upaya meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan serta dalam jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Berdasarkan peraturan menteri negara BUMN nomor PER-01/MBU/2011 tentang penerapan *Good Corporate Govenance* , bahwa setiap lembaga atau badan Usahamilik negara (BUMN) wajib menerapkan praktik *good corporate governance* dalam setiap aktivitas perusahaannya, hal ini bertujuan untuk

meningkatkan akuntabilitas dan nilai perusahaan yang berfungsi untuk mewujudkan nilai para pemegang saham jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, dan dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang ada.

Sedangkan menurut Santoso (2017) mekanisme *corporate governance* mangacu pada sekumpulan mekanisme yang mempengaruhi suatu keputusan yang akan diambil oleh seseorang pimpinan, keputusan tersebut akan diambil ketika terjadi kejadian pemisahan kepentingan dengan pendendalian. Dalam penelitian tersebut terdapat 5 mekanisme yang digunakan yaitu: kepemilikan manajerial kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit, kelima variabel tersebut dapat digunakan untuk menghindari konflik keagenan yang sering terjadi di perusahaan.

Menurut Puspitowati dan Muliya (2017) terdapat beberapa *mekanisme corporate governance* diantaranya adalah dewan komisaris. Dewan komisaris sendiri merupakan sumber ketahanan dan kesuksesan sebuah perusahaan, dalam sebuah perusahaan saat ini diwajibkan untuk memiliki setidaknya satu orang komisaris independen dari luar perusahaan yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan mereka berfungsi untuk melakukan fungsi pengawasan. Selanjutnya dewan direksi menurut UUPT (undang-undang tentang perseroan terbatas) nomor 40 tahun 2017 dalam pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa pengertian dewan direksi yaitu orang dalam perseroan yang diberi wewenang dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan perusahaan. Sehingga misi dan visi perusahaan dapat terwujud. Wujud tanggung jawab tersebut adalah dengan adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kepemilikan institusional keberadaan investor institusional bagi perusahaan merupakan mekanisme monitoring yang paling efektif, bagi manajemen untuk mengambil suatu keputusan (Iswadana, et al. 2017) selain kepemilikan institusional terdapat juga kepemilikan manajerial, kepemilikan ini dilihat dari berapa banyak jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dalam suatu perusahaan, sedangkan menurut Puspitowati dan Mulya (2014) menyebutkan bahwa komite audit merupakan alat monitoring penyusunan laporan keuangan perusahaan.

Penerapan *good corporate governance* diharapkan dapat menjaga kesinambungan antara hak dan kewajiban para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan dan stakeholder lainnya agar tidak ada pihak yang dirugikan, dampak negatif tidak diterapkannya mekanisme *good corporate governance* adalah pihak manajemen harus benar-benar mengawasi setiap aktivitas yang ada di perusahaan agar tidak terjadi penyimpangan.

Menurut Topowijaya (2018) kinerja keuangan adalah hasil pencapaian hasil kegiatan operasional perusahaan, dan dari hasil kinerja keuangan tersebut kita dapat melihat keefektifan manajemen perusahaan dalam memfungsikan segala unsur yang ada di dalam perusahaan dan dapat pula digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan telah melaksanakan peraturan-peraturan keuangan yang telah dibuat secara baik dan benar.

Bagi sebuah perusahaan menjaga dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan agar stabil dari tahun ketahun adalah hal yang wajib, hal ini dilakukan agar harga saham perusahaan tetap eksis dan diminati investor. Dalam hubungannya dengan kinerja keuangan laporan keuangan adalah hasil dari cerminan kinerja yang telah dihasilkan oleh perusahaan, dan merupakan tahap terakhir dari proses akuntansi dengan tujuan untuk memberikan informasi keuangan perusahaan, informasi ini merupakan gambaran kondisi perusahaan pada periode tertentu.

Bagi seorang investor ada 3 rasio yang menjadi fokus utama investor untuk melihat kinerja keuangan perusahaan rasio tersebut diantaranya: rasio solvabilitas, rasio likuiditas dan rasio probabilitas. Ketiga rasio tersebut merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan dan tiap rasio memiliki fungsi masing masing. Dalam penelitian ini berfokus pada rasio likuiditas dan rasio probabilitas. Rasio probabilitas pada penelitian ini berfokus pada rasio *Return On Equity* (ROE). ROE ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan atas kemampuan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan modal yang dimiliki perusahaan untuk mencapai laba maksimal.

Informasi dalam laporan keuangan bagi *stakeholder* dapat digunakan untuk melakukan pengendalian, pengkoordinasian dan perencanaan bagi menejer sedangkan dari segi kreditur untuk memberikan keputusan mengenai upaya

memperpanjang dan memperbesar pemberian kredit pada perusahaan dan bagi investor berguna untuk mempertimbangkan pemberian keputusan dalam alokasi modal ke perusahaan. Proses penyusunan keuangan melibatkan berbagai pihak antara lain pihak manajemen, dewan direksi, dewan komisaris dan pemegang saham, jika laporan ini disalah gunakan oleh salah satu pihak maka akan berpengaruh pada jumlah laba yang akan diperoleh perusahaan.

Pada penelitian sebelumnya sudah ada yang meneliti mengenai pengaruh *mekanisme good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan pada sektor telekomunikasi selain sektor telekomunikasi, sektor utama yang memiliki andil besar terhadap perekonomian Indonesia adalah sektor pertambangan, sektor pertambangan merupakan sektor utama sumber pendapatan negara mulai dari nilai ekspor, pembangunan daerah, peningkatan aktivitas ekonomi maupun pembukaan lapangan pekerjaan ataupun sumber pemasukan anggaran.

Contoh kasus pelanggaran praktik *Corporate governance* pada sektor pertambangan adalah padakasus PT Perusahaan Gas Negara yang melakukan pelanggaran prinsip pengungkapan laporan keuangan. Pelanggaran tersebut adalah menunda publikasi informasi material atas penurunan volume gas yang sudah diketahui manajemen sejak 12 September 2006, tetapi baru dipublikasikan pada bulan Maret 2007. Penurunan volume gas yang tidak dilaporkan sejak September 2006 tersebut telah memberikan informasi yang menyesatkan kepada investor.

Dengan adanya kasus-kasus praktik manajemen laba tersebut dapat dipertanyakan bagaimanakah efektivitas dari penerapan corporate governance. Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut penelitian yang berjudul “*PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KUANGAN PERUSAHAAN MANUFAKTURE SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PERTANIAN*”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan penelitian yang menarik untuk diteliti pada penelitian ini adalah :

1. Apakah RUPS berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (ROE)?
2. Apakah Dewan Direksi Berpengaruh terhadap Kinerja keuangan (ROE)?
3. Apakah komisaris Berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROE)?
4. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Kinerja keuangan (ROE)?
5. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROE)?
6. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan(ROE) ?
7. Apakah komite auidt berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROE)?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah RUPS Berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan
2. Untuk mengetahui apakah dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan
3. Untuk mengetahui apakah komisairs berpengaruh terhadapm kinerja keuangan perusahaan?
4. Untuk mengetahui apakah Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan
5. Untuk mengetahui apakah kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan?
6. Untuk mengetahui apakah Komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan?

7. Untuk mengetahui apakah Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti dapat memperoleh gambaran terhadap kondisi perusahaan, tata kelola perusahaan yang baik, factor factor yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan sector pertambangan yang ada di Indonesia, sehingga wawasan dan pengalaman peneliti bertambah

2. Bagi Perusahaan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan informasi tentang tata kelola perusahaan, serta tambahan informasi perusahaan dalam proses pengambilan keputusan terutama pada aspek yang berkaitan dengan penerapan praktek Corporate Governance

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan dapat membantu investor dalam mengambil keputusan

4. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi informasi dan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian-penelitian sebelumnya.